

Penanganan Banjir Harus Jadi Prioritas

Guna mengantisipasi banjir lima tahunan yang diprediksi oleh sejumlah kalangan akan terjadi di Jakarta pada Januari 2012, Pemprov DKI membangun sistem polder di seluruh wilayah Jakarta yang dinilai rawan banjir. Sistem itu memompa air ke saluran yang lebih besar, selanjutnya dialirkan ke laut.

"Kanal Banjir Timur (KBT) dan Kanal Banjir Barat (KBB) tidak bisa menyelesaikan semua ancaman banjir di Jakarta. Karena itu, konsistensi pemerintah pusat untuk membantu mengatasi banjir di Ibu Kota menjadi hal yang utama," kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo, Kamis (17/11).

Karena itu, lanjut Gubernur, pihak Pemprov DKI mendesak peran aktif pemerintah pusat dalam menanggulangi banjir di Ibu Kota. Apalagi, hingga saat ini, program Jakarta Emergency Dredging Initiative atau yang biasa disebut JEDI, yang pendanaannya dibantu Bank Dunia, belum juga terlaksana akibat terganjal peraturan pemerintah (PP).

Proyek pengerukan ini akan membenahi 10 sungai yang membelah Ibu Kota, satu kanal, dan empat waduk. Sebagian besar sungai dan saluran di Jakarta ada yang 30 tahun belum dikeruk.

Rencananya, kata dia, pinjaman dari Bank Dunia sebesar 1,5 triliun rupiah itu akan digunakan untuk menggosok ribuan rumah ilegal di bantaran sungai-sungai tersebut.

JEDI merupakan proyek utang kerja sama Pemerintah Indonesia, dalam hal ini pemerintah pusat dan saerah, khususnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan Bank Dunia. Pembahasan mengenai kerja sama proyek dilakukan sejak tahun 2008, setelah Jakarta mengalami banjir besar pada 2007. Banjir inilah yang menjadi alasan pemerintah dan Bank Dunia mengucurkan utang JEDI agar banjir yang terjadi bisa ditanggulangi.

Fauzi Bowo mengakui isu banjir menyangkut kepentingan hajat hidup orang banyak sehingga harus menjadi prioritas untuk ditanggulangi bersama dengan pemangku kepentingan terkait.

Dengan Kementerian PU, kata dia, pihaknya telah sepakat untuk bersama-sama mengeruk kali secara terintegrasi, tetapi hingga saat ini, belum ada tindak lanjutnya.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Muhammad Amron mengatakan untuk mengatasi banjir yang sering melanda sejumlah wilayah, termasuk Jakarta, Kementerian PU akan melaksanakan sejumlah proyek penanggulangan banjir dalam tiga tahun mendatang. Kementerian PU akan membangun proyek-proyek yang ada, seperti sungai dan waduk, untuk menanggulangi banjir.

Upaya tersebut meliputi antisipasi, tanggap darurat, dan pemulihan. Pada 2011 ini saja, Ditjen SDA mengalokasikan anggaran 4 triliun rupiah khusus untuk mengatasi banjir di seluruh Indonesia.

Terus Banjir

Pengamat lingkungan hidup dari Universitas Trisakti, Nirwono Yoga, mengatakan Jakarta akan tetap rentan banjir besar yang sering disebut banjir lima tahunan. Rusaknya sejumlah situ, penyempitan sungai, rencana reklamasi pantai, dan masih dikeluarkannya izin pembangunan membuat Jakarta semakin rentan banjir.

Banyaknya proyek betonisasi dan bangunan serta buruknya kondisi waduk dan situ membuat ibu kota Indonesia ini tidak mampu menahan air. Pembuatan gorong-gorong besar tidak akan efektif jika air laut lebih tinggi dari daratan.

Menurut dia, selama ini Pemprov DKI masih melakukan langkah pembangunan konvensional dan berorientasi proyek dalam mengatasi banjir atau genangan air. Langkah Pemprov mengatasi genangan air dengan membangun atau memperbaiki drainase atau gorong-gorong untuk mempercepat pembuangan air ke laut tidak akan menyelesaikan persoalan.

"Cara seperti ini sudah tidak berlaku di kota-kota maju di Eropa seperti Paris dan Berlin. Pasalnya, keberadaan gorong-gorong besar tidak akan berfungsi optimal saat kondisi air laut lebih tinggi dari daratan," kata dia.

Kota-kota besar di dunia, kata dia, saat ini telah menggunakan konsep ekodrainase atau drainase ramah lingkungan, yakni dengan menyerapkan air sebanyak-banyaknya ke tanah.